



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LaKIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025



"Dinsos
untuk
Masyarakat"

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa hanya karena penyertaan dan bimbingannya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dapat disusun sebagaimana diharapkan. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggungjawaban Kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan setiap program kegiatan kepada masyarakat disusun dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2025 berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan atas visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis selama tahun 2025, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan.

Disamping Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 2025 ini merupakan sarana pengawasan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan demi perbaikan dan upaya efektifitas serta efisiensi pelaksanaan tupoksi sehingga tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LaKIP) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntok, 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN,

SYAHDANI, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi	2
c. Maksud dan Tujuan	7
d. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
a. Perencanaan	10
b. Kinerja Pelayanan PD	27
c. Kelompok Sasaran Pelayanan	31
d. Permasalahan dan Isu Strategis PD	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
a. Pengukuran Capaian Kinerja	35
b. Analisis Capaian Kinerja	37
c. Evaluasi Capaian Kinerja	39
BAB IV P E N U T U P	40
a. Kesimpulan	40
b. Saran Tindak Lanjut	42

Lampiran :

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah : (1) Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat (2) Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.

Dari tujuan tersebut diatas analisis Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) ternyata secara umumnya menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja telah berhasil dengan sangat baik yaitu dengan total nilai 100%. Hal ini berarti bahwa target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai bahkan ada sebagian dari indikator kurang/melebihi dari target sasaran yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan untuk memenuhi permintaan/kebutuhan dari masyarakat untuk penyerataan pembangunan.

Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan telah dan terus berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LaKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.

Pengukuran Penetapan Kinerja (PPK) 2025 telah disesuaikan dengan Renstra Dinas Sosial 2025-2029 yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga Penetapan Kinerja (PK) 2025 juga mengalami perubahan pula. untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Barito Selatan Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan juga penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, ditindak lanjuti juga dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Dinas Sosial wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan, atas dasar tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terciptanya cita-cita dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan tepat sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab berasaskan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, atas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas pada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan oleh stakeholders untuk tercapainya pemerintahan yang akuntabel. Kemudian informasi kinerja yang ada dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah secara internal untuk perbaikan kinerja.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, disusun secara kooperatif oleh seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu LaKIP digunakan sebagai aspek pedoman dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Barito Selatan 2025-2029, yaitu **"Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara"**

Memberikan informasi kinerja yang teratur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Mendorong Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan untuk meningkatkan kinerjanya. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap

Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Tugas Pokok Fungsi

Dasar Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. dengan ini Dinas Sosial dalam upaya menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Sosial.

2. Fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis Sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial;
4. Penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang Sosial;
5. Penyelenggaraan kebijaksanaan Sosial di bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Sosial; dan
7. Pelaksanaan urusan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ Kepala Dinas

Uraian Tugas Jabatan :

- Membantu Bupati melaksanakan penyusunan Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah, Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas Sosial;
- Peningkatan nilai SAKIP Dinas Sosial; dan
- Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

❖ **Sekretaris**

Uraian tugas Jabatan :

- pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
- Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial;
- Pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan;

- Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana;
- Pengoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan;
- Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian;
- Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan keprotokolan;
- Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
- Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program kegiatan serta administrasi keuangan dan monitoring serta evaluasi;
- Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial;
- Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;

- Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Sosial;
- Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial**

- Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Pelaksanaan koordinasi bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
- Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Pelaporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

❖ **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

- Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Penyiapan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

- Penyiapan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Penyiapan dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan instansi terkait;
- Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai tugas dan kewenangannya;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pelaporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

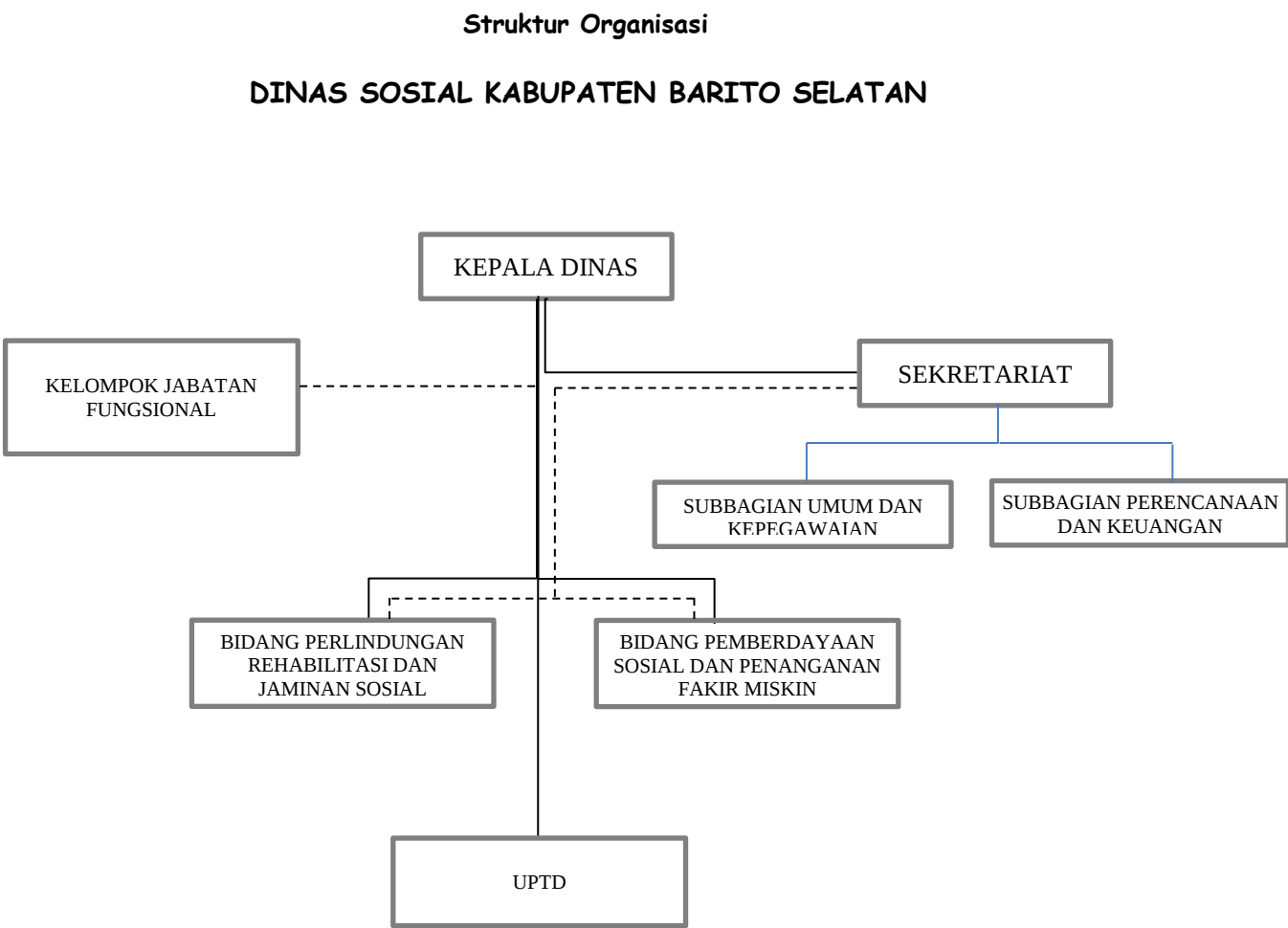
- Melaksanakan tugas dan arahan dari Kepala Dinas dan dibebankan tanggung jawab terhadap Bidang sebagai pelaksanaannya.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 1. Kasubbag Umum Kepegawaian
 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Struktural yang mengisi Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

- Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II.b
- Sekretaris Dinas dengan Jabatan Eselon III.a

- Kepala Bidang dengan Jabatan Eselon III.b
- Kepala Sub Bagian dengan Jabatan Eselon IV.a



Keterangan

- = garis koordinasi administratif
- = garis komando

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Sosial didukung oleh 47 Pegawai diantaranya : 22 orang PNS dan 22 orang PPPK, 1 orang Tenaga Kontrak Daerah dan 2 Orang Tenaga Harian Lepas. Sumber Daya Aparatur ini dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, berdasarkan golongan/ruang dan eselon digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel berdasarkan Eselon PNS/PPPK/TKD/THL

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kadis	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	20	23
3	Kabid PRJS	-	1	-	9	10
4	Kabid PSFM	-	1	-	8	9
5	JFT	-	-	4	-	4
Jumlah		1	3	6	37	47

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, antara lain:

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja kegiatan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan sebagaimana tersebut diatas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, mempunyai fungsi :

- a. Sebagai sarana untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati serta seluruh stakeholders;
- b. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kegiatan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah secara garis besar berisikan tentang informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2025.

D. Sistematika Penyajian

Isi dan ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, mencakup analisis evaluasi lingkungan internal dan eksternal organisasi dengan menyajikan dan memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari aspek sosial, budaya, tataruang dan birokrasi Pemerintah. Bertitik tolak ukur dari Visi dan Misi serta arah kebijakan Pembangunan daerah, selanjutnya ditetapkan program skala prioritas yang harus dilaksanakan pada Tahun 2025 yang sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dan arah kebijakan umum daerah serta kebijakan umum anggaran. Untuk tercapainya keberhasilan program tersebut mutlak memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

serta partisipasi masyarakat dan para pelaksana pembangunan lainnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, merupakan suatu perwujudan pelaksanaan kewajiban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagai Pejabat Eselon II untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan melaporkan/ menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk pencapaian yang menyebabkan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban secara periodik.

Sistematika pelaporan dalam penulisan penyusunan LaKIP Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2025 ini berisikan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi, susunan organisasi, maksud tujuan dan fungsi, isi LaKIP dan sistematika pelaporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi pembahasan pernyataan Visi Misi, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tujuan dan sasaran, gambaran rencana kinerja, sasaran dan kegiatan Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Bab ini berisi pembahasan kerangka pengukuran kinerja, analisis efisiensi dan efektivitas, tujuan dan manfaat pengukuran kinerja, gambaran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja mencakup pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian kesimpulan mengenai capaian visi organisasi, capaian yang kurang berhasil/permasalahan dan strategi pemecahan masalah. Selain itu masalah pokok dominan disebabkan oleh beberapa masalah spesifik.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 serta dijadikan acuan/pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mempunyai tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan yaitu :

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
- Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju.
- Menjadikan Masyarakat Tangguh dengan Kualitas Hidup yang Sejahtera.

Sasaran :

- Upaya ketahanan bencana.
- Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal.
- Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender.

B. Kinerja Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan selain melaksanakan kegiatan rutin juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :

1. Penanganan masalah kemiskinan, dengan melakukan kegiatan bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat kurang mampu dan pemberian bantuan KUBE.

2. Penanganan masalah lanjut usia, dengan melakukan kegiatan bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia non produktif diluar panti berupa UEP dan Asistensi.
3. Penanganan masalah kecacatan (Cacat fisik, cacat mental, cacat ganda) dengan melakukan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, berupa pengadaan alat Bantu untuk penyandang cacat dan pemberian Asistensi bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).
4. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, berupa kegiatan Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Karang Taruna, Organisasi Sosial, PSM, Tagana), berupa kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
6. Penanganan tanggap darurat bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2021-2024

Persentase Realisasi Capaian SPM						
Uraian SPM		2021	2022	2023	2024	Keterangan
SPM Sosial						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial	81,33	93,33	96,92	96,92	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	81,33	92	96,67	96,67	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	0	92	96,92	96,92	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0	92	96,67	96,67	
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	84	100	100	100	

Tabel Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Bidang Sosial							
Indikator Kinerja		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IKK Sosial							
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Jiwa	100	100	100	100	100
2	Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Jiwa	100 (2540 kpm)	100 (2649 kpm)	100 (2579 kpm)	100 (2518 kpm)	100 (2520 kpm)
3	Korban bencana alam	Jiwa	18044	93	27772	59196	3654

4	Korban bencana sosial	Jiwa	270	80	9	27	111
5	Gelandangan dan Pengemis	Jiwa	-	-	5	3	3
6	Penderita HIV/AIDS	Jiwa	-	11	-	12	-
7	Fakir Miskin	Jiwa	1875	4691	5065	5995	5114
8	Anak korban kekerasan seksual	Jiwa	6	6	5	2	6
9	Lanjut usia terlantar	Jiwa	50	80	127	2	2
10	Penyandang Tuna Wicara - Rungu	Jiwa	-	-	3	-	-
11	Tuna Daksa	Jiwa	6	-	-	-	-
12	Penyandang Cacat Fisik	Jiwa	-	-	194	251	251
13	Tuna Susila	Jiwa	0	0	0	0	-

c. Kelompok Sasaran Pelayanan

Gambaran Sasaran Pelayanan pada Dinas Sosial kabupaten Barito Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Gambaran Umum pelayanan Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. pelayanan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga sosial. Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi, yaitu :

- 1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan
- 2) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Salah satu bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, pendampingan, konseling, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Sasaran pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus)

maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) lewat lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna fasilitasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak.

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam Kegiatan yang telah berjalan berfokus pada pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang miskin. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa bahan makan pokok, dan jaminan sosial lanjut usia atau sering dikenal dengan ASLUT.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, seseorang termasuk dalam PMKS akibat kecacatan adalah apabila seseorang yang menyandang kecacatan mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan sosial karena kecacatan yang dialaminya, misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri/tergantung pada orang lain, tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak dapat mengakses kesempatan kerja, serta pelayanan sosial dasar lainnya.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan. pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. melalui kegiatan koordinasi keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain.

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/ pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi baik. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kedepan sasaran pemberian bantuan KUBE akan menyasar pada kelompok masyarakat perkotaan, perdesaan dan pesisir. Pengelolaan data akan mempunyai pengaruh besar bagi para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait penanganan kemiskinan. Data kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial akan dipergunakan untuk penentuan sasaran peserta BPJS PBI, pemberian bantuan sosial, penentuan KPM program sosial. Pemberian bantuan stimulan bagi fakir miskin, penerbitan rekomendasi BPJS fakir miskin, pengelolaan bantuan non tunai KPM, Program Keluarga Harapan, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Bantuan Sosial korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam yang berpotensi diantaranya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kabut asap. Sedangkan bencana sosial yang sering terjadi yaitu bencana kebakaran. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa baik bencana alam maupun bencana sosial, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh faktor bencana, baik bencana alam, dan/atau bencana sosial dalam fase tanggap darurat. Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya pemeliharaan pemenuhan kebutuhan dasar seseorang/keluarga/kelompok/masyarakat. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial merupakan upaya kemanusiaan diberikan yang dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Adapun hasil yang dicapai antara lain Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta keterlibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam. Sasaran kegiatan tersebut yaitu warga masyarakat, baik secara perorangan/keluarga/kelompok yang mengalami bencana (Korban bencana alam; korban bencana sosial, yang meliputi orang yang mengalami keterlantaran diperjalanan, pencari kerja antar daerah/antar pulau korban masalah ketenagakerjaan, korban tindak kekerasan, korban eksploitasi sosial (praktek pelacuran, pengemis dan gelandangan), eks Napi dan Penderita Psikotik yang menderita, maupun Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

2. Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu/kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP. Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur

kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda lewat Pemugaran dan pemeliharaan TMP. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran. masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya. SLRT adalah sistem layanan rujukan terpadu yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan ditangani dengan baik. Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, kesenjangan dan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

D. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki serta capaian kinerja pelayanan sosial yang belum tercapai dapat diidentifikasi beberapa **permasalahan** yang dihasilkan melalui pemetaan masalah. Pemetaan permasalahan di kelompokan menjadi :

1. Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal.

Efektivitas penerima bantuan sosial di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya dapat diukur dari sisi ketercapaian penyaluran. Meskipun tingkat penyaluran tersalurkan sempurna selama lima tahun terakhir, hal tersebut belum menjamin bahwa bantuan tersebut benar-benar terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Akibatnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tetap berada dalam kondisi rentan, terutama karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah KPM yang tidak menurun secara signifikan. Situasi ini memperlemah peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan serta menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan sosial tanpa disertai peningkatan kapasitas produktif masyarakat.

Topik Sosial masalah terdapat pada Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan. Akar masalahnya Bantuan terserap belum sepenuhnya untuk kebutuhan dasar, Ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan sosial dan Pemberian bantuan sosial masih berupa bantuan kebutuhan dasar yang bersifat jangka pendek.

2. Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan.

Persentase penduduk miskin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan belum mampu mengatasi akar struktural kemiskinan baik dari sisi desain program maupun efektivitas pelaksanaannya. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru berpotensi menciptakan ketergantungan karena belum terintegrasi dengan strategi peningkatan kemandirian ekonomi. Di sisi lain, persoalan teknis seperti ketidak-tepatan sasaran, lemahnya basis data, serta kurangnya integrasi antar program juga turut memperburuk efektivitas kebijakan. Adapun rincian masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Topik Sosial masalah terdapat pada Persentase Penduduk Miskin. Akar masalahnya Program pengentasan kemiskinan belum berjalan secara tepat sasaran, Belum optimalnya pemberian bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial, Belum optimalnya pengintegrasian pendataan masyarakat miskin, Lemahnya pemutakhiran dan analisis data kemiskinan, dan Belum optimalnya skema integrasi bantuan sosial dan peningkatan produktivitas penerima manfaat.

3. Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses pekerjaan, layanan publik, serta kesempatan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun demikian, perhatian dan upaya pemberdayaan terhadap kelompok ini masih terbatas. Hal ini tercermin dari belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan lapangan kerja inklusif. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Topik masalah terdapat pada fasilitasi layanan Penyandang Disabilitas. Akar masalahnya Minimnya tempat kerja yang ramah disabilitas,

Minimnya sistem layanan publik yang inklusif dan adaptif bagi disabilitas, Keterbatasan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Minimnya pelatihan atau workshop bagi penyandang disabilitas, dan Sekolah khusus belum tersedia secara merata.

4. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan secara lebih transformatif, dari pola bantuan sosial berbasis konsumsi menuju peningkatan produktivitas dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Pendekatan graduasi menjadi langkah strategis dengan penahapan yang terukur dari bantuan kebutuhan dasar menuju produktivitas ekonomi. Bantuan sosial juga harus menyasar secara merata seluruh kelompok rentan, termasuk anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia. Transparansi dalam pendataan dan penyaluran diperlukan agar manfaat diterima secara utuh. Sementara itu, kesadaran penerima manfaat juga perlu diarahkan dan dibangun bahwa bantuan sosial adalah bagian dari proses pemberdayaan, yang membutuhkan komitmen bersama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Isu Strategis, Barito Selatan yang berpenduduk 137.914 jiwa dengan luas wilayah 8.830 KM² dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikelola namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan khususnya masyarakat di perdesaan, sehingga merupakan tantangan yang harus dihadapi dan ditangani dalam kesejahteraan sosial dimasa-masa mendatang. Isu global terhadap wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan identifikasi isu utama yang perlu diantisipasi seperti adanya cuaca ekstrem, perubahan kritikal terhadap ekosistem, krisis sumber daya alam, dampak teknologi AI, polarisasi sosial dan polusi udara.

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan	Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal	Bantuan sosial belum efektif mendorong kemandirian penerima manfaat	Polarisasi sosial	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Bantuan terserap belum sepenuhnya untuk kebutuhan dasar	Peningkatan SDM dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
	Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Penanganan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang	Polarisasi sosial	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pengintegrasian pendataan	Peningkatan Pengentasan Penanganan Kemiskinan

		efektif			masyarakat miskin	
	Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dan fasilitas layanan publik ramah disabilitas	Polarisasi sosial	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Minimnya sistem layanan publik yang inklusif dan adaptif bagi disabilitas	Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
	Risiko Gangguan Bencana Terhadap Ketahanan Wilayah	Adanya ancaman risiko bencana alam banjir dan kebakaran lahan	Krisis sumber daya alam	Krisis Lingkungan	Lokasi permukiman yang berada di sepanjang pinggir sungai	Peningkatan Penanganan Ketahanan Bencana

Isu nasional seperti terjadinya dampak hilirisasi terhadap perekonomian Indonesia, Hilirisasi merupakan bentuk industrialisasi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah atas komoditas mentah, menjadi produk yang bernilai tinggi. Keselarasan kebijakan makro dan sektoral merupakan upaya untuk memastikan kebijakan yang ada bersifat saling mendukung dikarenakan kebijakan makro, seperti insentif fiskal, dibutuhkan untuk memaksimalkan kebijakan sektoral, seperti kebijakan industri. Standar sustainability merupakan pedoman yang mengatur praktik bisnis para pelaku usaha dengan menekankan pada komitmennya terhadap kualitas lingkungan, produk, dan etik baik. Sampai saat ini terdapat banyak standar sustainability yang telah dirilis, salah satunya adalah ISO 26000 yang mengatur terkait social responsibility.

Dalam rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, telah terpetakan beberapa isu strategis di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Isu ini disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan isu nasional maupun global. Perhatian akan isu ini menjadi penting dalam mencapai tujuan jangka panjang RPJPD Kalimantan Tengah 2025-2045.

Akuntabilitas tata kelola pemerintah yang buruk, daerah berperan penting untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan mampu mencapai apa yang telah direncanakan. Pada aspek ini, berbagai permasalahan telah dipetakan seperti inefisiensi anggaran hingga korupsi kerap terjadi di lingkup Provinsi, Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak serta menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah berdaya saing. Salah satu aspek yang menjadi penghambat yakni rendahnya kualitas dan daya saing SDM. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmerataan akses pendidikan. rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas akan menghambat proses pembangunan, terutama peningkatan biaya logistik yang meningkat tajam. degradasi lingkungan semakin kerap terjadi di provinsi. Pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, sampai biodiversity loss merupakan beberapa

permasalahan yang timbul sebagai akibat dari degradasi lingkungan. Lebih lanjut, tidak hanya aspek lingkungan, kerugian juga mulai dirasakan oleh masyarakat baik dari sisi kesehatan hingga perekonomian.

Berdasarkan pada telaah yang dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial untuk periode lima tahun mendatang adalah Penanggulangan Permasalahan Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. Pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya.
2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi Orang Dengan Kecacatan.
3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran (anak dan lanjut usia).
4. Peningkatan pelayanan dan jaminan sosial korban bencana, serta untuk menunjang pelaksanaan dan kelanjutan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dari lingkungan sosial PMKS.
6. Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia dalam program daycare services.
7. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
8. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
9. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial dan menguatnya keberpihakan dunia usaha penanganan PMKS.
10. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
11. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.
12. Integrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable.
13. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PMKS lainnya.
14. Pengembangan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas PSKS dan PMKS dalam pengelolaan bantuan sosial yang diberikan secara non tunai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP), maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan sebagai organisasi Perangkat Daerah diakhir Tahun 2025 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2025 tersebut disampaikan gambaran tentang tingkat pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan.

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL											
- Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	4,83	4,61	4,19	3,77	3,55	2.93	2.51	
		Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	74 (Maju)	74,1 (Maju)	74,5 (Maju)	75,1 (Inklusif)	75,59 (Inklusif)	76,08 (Inklusif)	76,57 (Inklusif)	

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.	Bantuan sosial dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.	Upaya ketahanan Bencana.	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana	Meningkatkan kapasitas mitigasi kebencanaan
2	Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.	Menjadikan Masyarakat Tangguh dengan Kualitas Hidup yang Sejahtera.	Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dan perlindungan dari kekerasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	74	74,11	74,5	75,1	75,59	76,08	76,57	
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,83	4,61	4,19	3,77	3,55	2,93	2,51	
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,10	3,10	3,20	3,50	3,70	3,90	4,00	
5	Angka Monitoring Surveillance Controlling for Prevention (MSCP) KPK	Angka	74	75	76	77	78	78,75	78,85	
6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	71	71	72	73	74	75	76	

Tabel Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Persentase Target Capaian SPM						
Uraian SPM		2025	2026	2027	2028	2029
SPM Sosial						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100	100	100	100	100

Tabel Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2025-2029

Target Capaian Indikator Bidang Sosial							
Indikator Kinerja		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
IKK Sosial							
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Jiwa	100	100	100	100	100
2	Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Jiwa	100	100	100	100	100
3	Korban bencana alam	Jiwa	100	100	100	100	100
4	Korban bencana sosial	Jiwa	100	100	100	100	100
5	Gelandangan dan Pengemis	Jiwa	100	100	100	100	100
6	Penderita HIV/AIDS	Jiwa	100	100	100	100	100
7	Fakir Miskin	Jiwa	100	100	100	100	100
8	Anak korban kekerasan seksual	Jiwa	100	100	100	100	100
9	Lanjut usia terlantar	Jiwa	100	100	100	100	100
10	Penyandang Tuna Wicara - Rungu	Jiwa	100	100	100	100	100
11	Tuna Daksa	Jiwa	100	100	100	100	100
12	Penyandang Cacat Fisik	Jiwa	100	100	100	100	100
13	Tuna Susila	Jiwa	100	100	100	100	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1)	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Kriteria	B
		Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Surveillance Control for Prevention (MSCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Indeks	80
2)	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	4,6
3)	Memperkuat Nilai Sosial, Wawasan Kebangsaan, dan Pelestarian Budaya Lokal	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	Indeks	74,1 Maju

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU 2025 (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3	4	5	6
	5	BELANJA DAERAH			
	5.1	BELANJA OPERASI	Rp 11.250.826.453	Rp 9.961.285.154	Rp 1.289.541.299
1	5.1.01	- Belanja Pegawai	Rp 4.934.662.459	Rp 4.082.197.612	Rp 852.464.847
2	5.1.02	- Belanja Barang dan Jasa (termasuk Perjadin)	Rp 5.308.663.994	Rp 4.699.087.542	Rp 609.576.452
3	5.1.06	- Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.007.500.000	Rp 1.180.000.000	-Rp 172.500.000
	5.2	BELANJA MODAL	Rp 216.353.726	Rp 181.310.000	Rp 35.043.726
4	5.2.02	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin+Gedung dan Bangunan	Rp 216.353.726	Rp 181.310.000	Rp 35.043.726
TOTAL SURPLUS (DEFISIT)			Rp 11.467.180.179	Rp 10.142.595.154	Rp 1.324.585.025

RENCANA AKSI 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

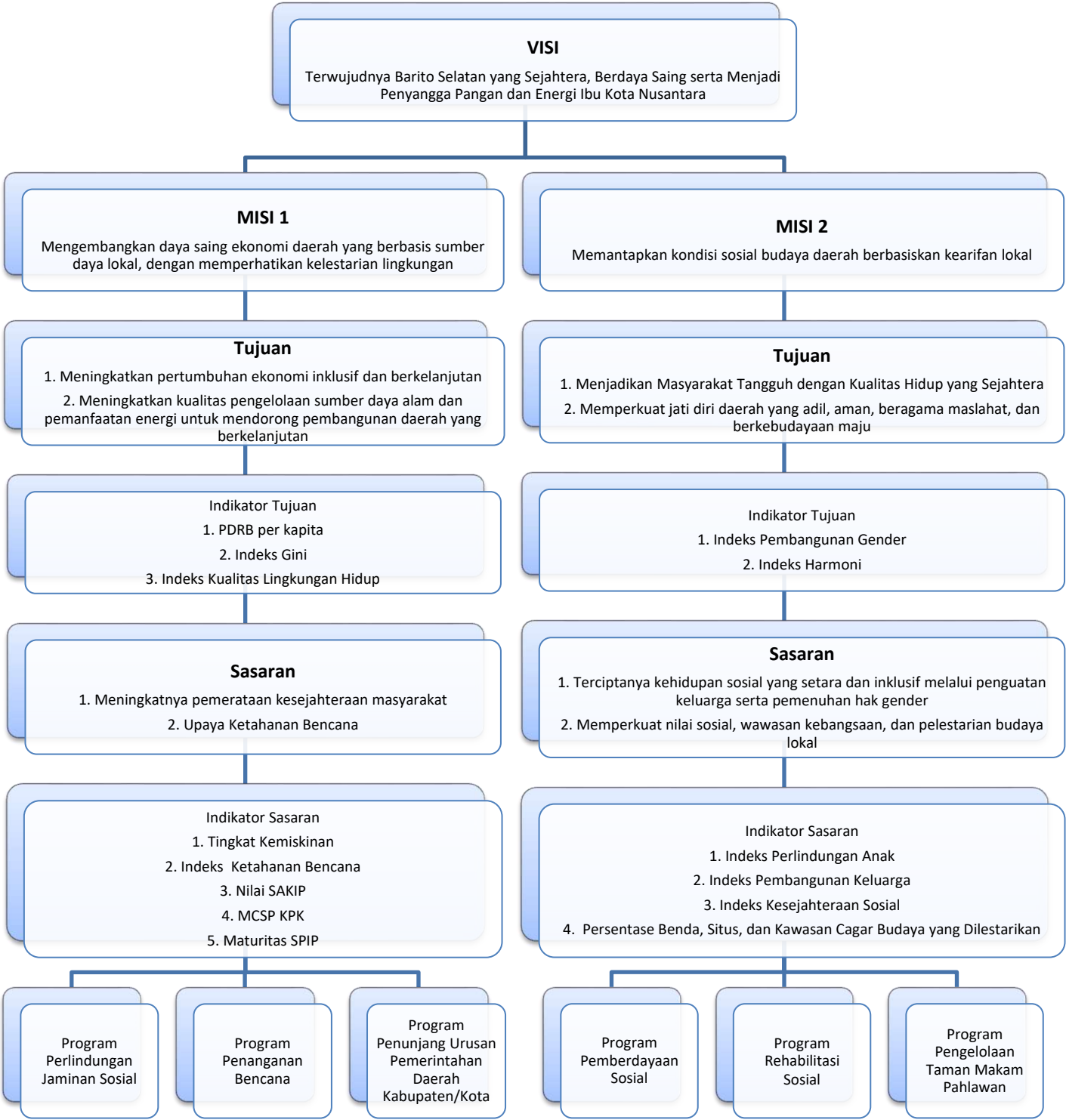
N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Angka Kemiskinan Daerah	30 %	30%	20%	20%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Prosentase Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	1.191.500.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Prosentase Jumlah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tertangani	142.500.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
		Angka Kemiskinan Ekstrem	30 %	30%	20%	20%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.700.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
2.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase PMKS yang mandiri	25 %	25%	25%	25%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi	97.200.000	DINSOS Kab. Barito Selatan

									Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
								Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	164.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	700.100.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINSOSKab. Barito Selatan
								Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan

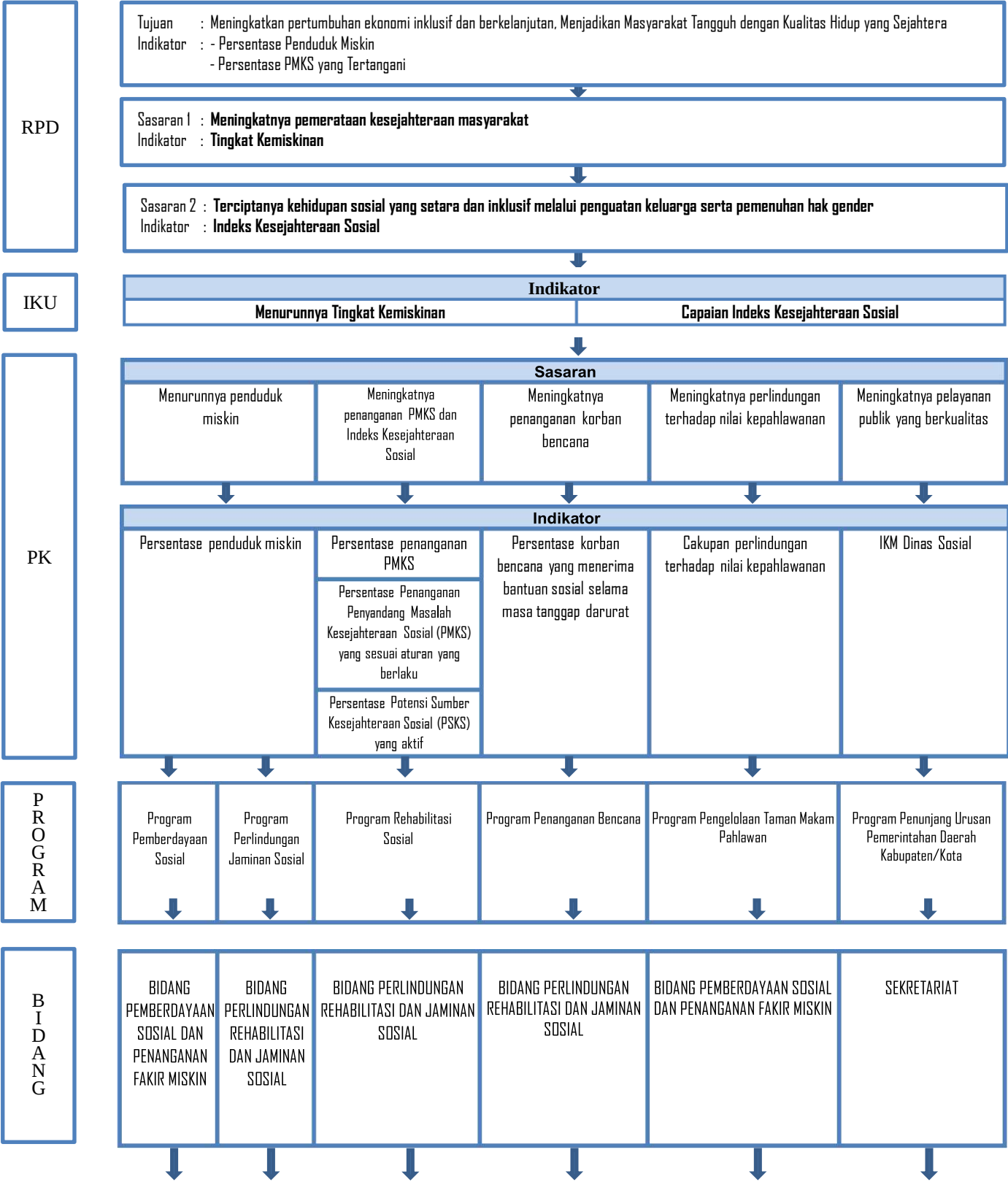
							PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah rekomendasi persetujuan pengadaan kapal perikanan	100.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
							PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	150.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
3.	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	B	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	50.280.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan	5.055.612.45 9	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang	25.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan

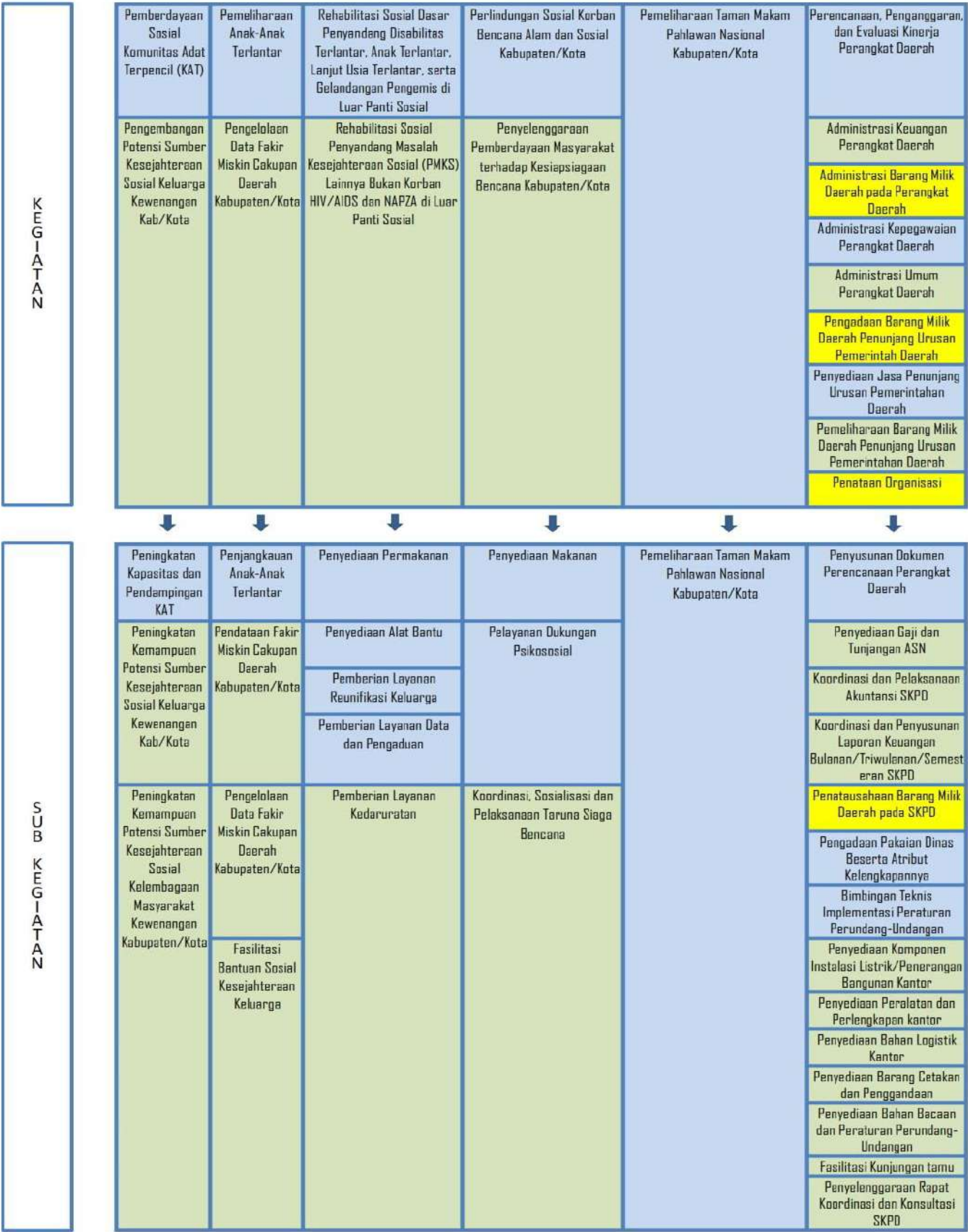
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan data kepegawaian	140.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya bahan logistik kantor	441.880.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana kantor	50.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan fasilitas kantor	809.107.720	DINSOS Kab. Barito Selatan
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional dan bangunan kantor yang dipelihara	165.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
		Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada DINSOS	20	30	20	20		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50.000.000	DINSOS Kab. Barito Selatan
								J U M L A H		11.467.180.179	

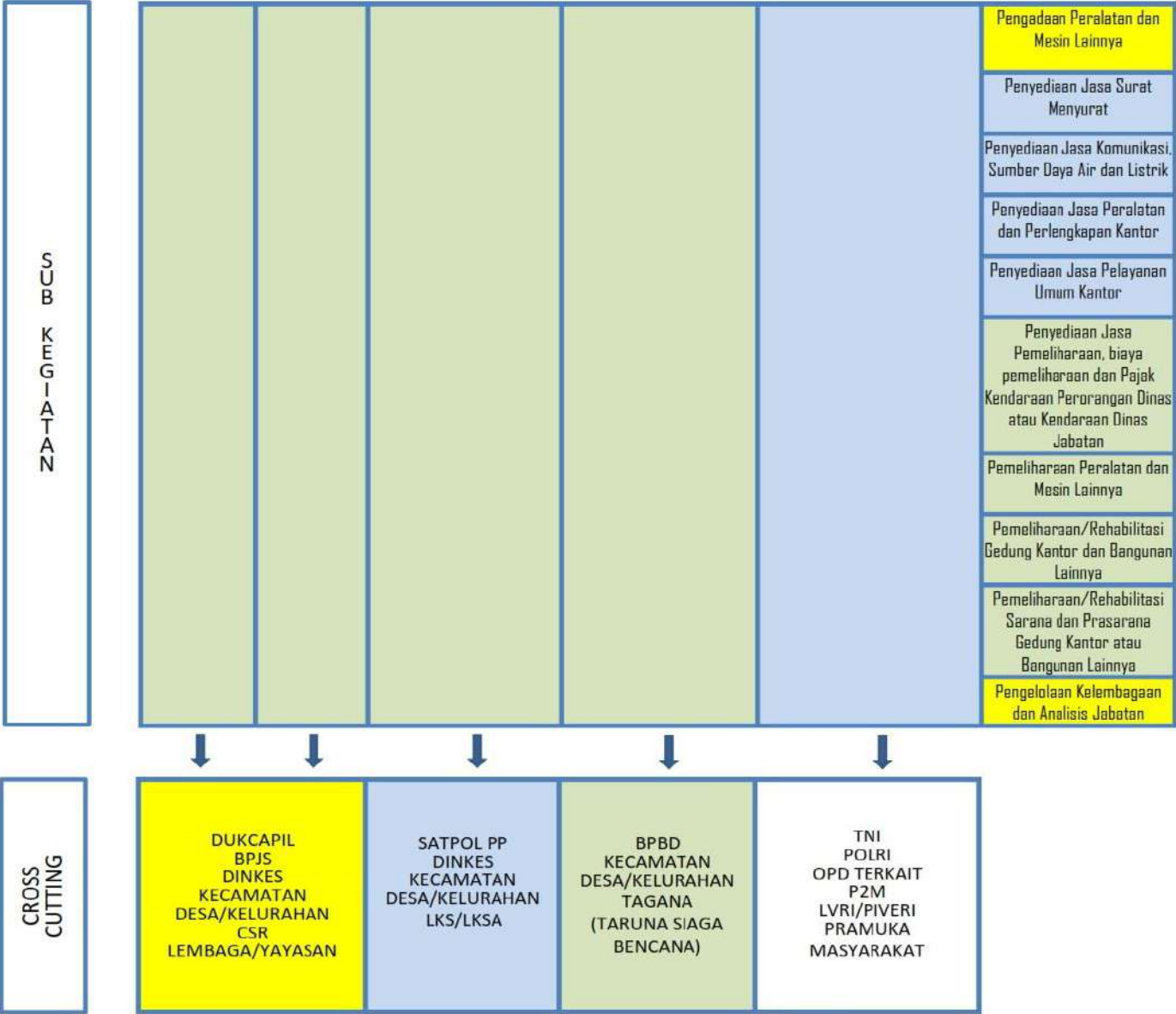
POHON KINERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025



CROSS CUTTING DINAS SOSIAL 2025







CASCADING DINAS SOSIAL 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja administrasi pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persenatase capaian layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan Realisasi Anggaran Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Realisasi Anggaran Keuangan SKPD
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Penataan Organisasi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Kapasitas Perangkat Daerah	Penataan Organisasi	Tersedianya Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
								Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Angka Kemiskinan Daerah	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	meningkatnya kapasitas KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KK pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS yang diberdayakan	Jumlah Keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mandiri	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan bagi PMKS Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
								Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan
								Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga
								Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
								Pemberian layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan layanan Data dan Pengaduan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis layanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang	Jumlah PMKS lain yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan dasar dan rehabilitasi sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan yang terlayani	Jumlah Anak Terlantar yang di Tangani Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang mendapat Penanganan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terlayani	Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terlayani	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata
	Angka Kemiskinan Ekstrim							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)
								Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapat Pelayanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan bencana oleh Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam yang dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	74	74,11 (Maju)	74,5 (Maju)	75,1 (Maju)	75,59 (Inklusif)	76,08 (Inklusif)	76,57 (Inklusif)	
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,83	4,61	4,19	3,77	3,55	2,93	2,51	
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	4	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	71	71	72	73	74	75	76	
5	Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	Angka	74	75	76	77	78	78,75	78,85	

INDIKATOR KINERJA DAERAH
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	74	74,11 (Maju)	74,5 (Maju)	75,1 (Maju)	75,59 (Inklusif)	76,08 (Inklusif)	76,57 (Inklusif)	
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,83	4,61	4,19	3,77	3,55	2,93	2,51	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	4	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	71	71	72,00	73,00	74,00	75	76,00	
3	Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	Angka	74	75	76	77	78	78,75	78,85	

INDIKATOR KINERJA KUNCI
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
I	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Prosentase Taman Makam yang dipelihara	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
1	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100	80	82	85	86	88	90	
2	Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	64	81	83	85	87	88	90	
3	Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	70	72	83	85	87	88	90	
4	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	85	85	85	86	87	88	90	
5	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	83	84	85	87	87	88	90	
6	Persentase Manula Potensial yang mendapat Perlindungan	83	85	87	88	89	90	90	
7	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100	81	83	85	87	88	90	

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan ini yaitu untuk memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan program di Kabupaten Barito Selatan, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
- e) Pelaksanaan pengelolaan UPTD; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka, berikut ini kami uraikan gambaran singkat mengenai isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2025 yang menggambarkan pencapaian program pembangunan khususnya program-program Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Program Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial pada tahun 2025 yaitu persentase PPKS desil 5 dan Desil 6 yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial memiliki capaian sebesar 90% dari target 100% artinya pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 berjalan dengan efektif dan mendukung tercapainya IKU Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan.

B. Saran Tindak Lanjut

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 tidak terlepas dari permasalahan internal dan eksternal antara lain :

Internal,

- Belum dilakukannya pemutakhiran data PPKS dan KPM di lingkungan Kabupaten Barito Selatan, sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan calon penerima bantuan sosial yang berhak menerima bantuan sosial.
- Belum tersedianya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

- Belum adanya pemutakhiran data PSKS di Kabupaten, sehingga beberapa PSKS yang berpotensi untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menjadi terhambat.

Eksternal,

- Belum maksimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pendataan PPKS.
- Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial seperti kesempatan kerja bagi PPKS khususnya Disabilitas Terlantar.
- Dst.

Rencana tindak lanjut Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan terhadap masalah diatas berupa :

1. Perlu diadakan pelatihan terhadap SDM Pegawai/Karyawan di Lingkungan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dan Juga SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Guna mendukung Berjalannya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Optimal.
2. Perlu dilakukan pemutakhiran berkala data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan juga PSKS di Kabupaten Karawang agar data yang disajikan selalu terupdate.
3. Perlu ditingkatkan kerjasama antara Dinas Sosial dengan PSKS yang ada, beserta stakeholder instansi terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Perlunya update data tunggal sosial ekonomi nasional guna menunjang keseragaman akses data.
5. Sosialisasi berjenjang antar Dinas Sosial dan juga PSKS dalam kinerja pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Sosial tahun 2025 disusun dengan harapan dijadikan bahan monitoring evaluasi kinerja pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.